

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ada sinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan di Gunungkidul antara lembaga formal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan lembaga informal yaitu Kelompok Tani HKm sehingga sektor pertanian mempunyai kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan sektor lain yaitu mencapai Rp 1,6 triliun atau 37,87%. Pada tahun 2006/2007 surplus beras sebanyak 41 ribu ton. Tahun 2007/2008 produksinya meningkat lebih dari 30 persen dengan surplus 91 ribu ton. Sedangkan arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul selama 5 tahun sampai tahun 2010, menjadikan sektor pertanian dalam arti luas sebagai pondasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan mentargetkan paling tidak 50 hektar hutan dalam 2010 dapat tercapai.
2. Faktor pendukung agar terwujud ketahanan pangan di Kabupaten Gunung kidul adalah:
 - a. Adanya Surat Keputusan Bupati Gunung kidul no. 213/KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
 - b. Adanya Surat Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Gunung Kidul selama 25

- c. Partisipasi aktif dari masyarakat Gunung kidul terhadap pengembangan pertanian dan kehutanan melalui program Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm).
- d. Adanya dukungan dari pemerintah daerah Gunungkidul melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta dinas Kehutanan dan Perkebunan , melalui kebijakan pertanian jangka panjang.
- e. Pengawasan dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan lahan pertanian baik itu dari peraturan intern kelompok tani HKm maupun dari dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan faktor yang menghambat adalah

- a. Kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura mengenai penyaluran pupuk yang langka di pasaran dan sulit dijangkau oleh petani.
- b. Belum adanya keputusan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengenai prosentase bagi hasil dengan kelompok Tani HKm.
- c. Dari aspek kelembagaan baik Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan masih kurang dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta
- d. Masalah keamanan dan pengawasan dalam Kelompok Tani HKm

B. SARAN

1. Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura serta Dinas Kehutan dan Perkebunan perlu meningkatkan frekuensi penyuluhan terhadap petani HKm sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan ekonomi masyarakat.
2. pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura serta Dinas Kehutan dan Perkebunan perlu meningkatkan fasilitasi terhadap kelom[pok tani HKm baik itu dari segi kelembagaan, modal usaha, dan kerja sama usaha dengan pihak swasta.
3. Segera di putuskan tentang prosentase bagi hasil antara pemda dengan petani KHM yang mempertimbangkan kesejahteraan dan peningkatan